



# Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Padat Karya Tunai Desa Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam (Studi Kasus Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru)

Fazry Hairullah<sup>1</sup>, Ansharullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E-mail: [fzhrllh67@gmail.com](mailto:fzhrllh67@gmail.com)<sup>1</sup>, [ansharullah125@gmail.com](mailto:ansharullah125@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 20-12-2023 | Received in revised form 02-01-2024 | Accepted 26-03-2024

## Abstract

Empowerment of poor communities is an initiative from individuals or groups to improve the quality of life, both socially and economically. This research focuses on exploring efforts to empower poor communities through village cash-intensive programs, by analyzing the economic perspective of Islamic development in Banua Lawas Village, Kotabaru. This research method is field in nature with a descriptive approach, carried out in Banua Lawas Village, Kelumpang Hulu District, Kotabaru Regency, South Kalimantan. The informants consisted of 12 people, including 2 village officials and 10 village cash labor program workers. Data was collected through interviews and documentation. The research results show that the village cash-intensive program has succeeded in empowering poor communities according to the theory of Jim Ife and Frank Tesoriero. The village government acts as a facilitator, educator, representative and technology supporter to achieve the program's objectives. Empowerment of poor communities is in accordance with the concept of Islamic development economics by M. Umer Chapra, by fulfilling the principles of monotheism, rububiyah, khalifah, and takziah, as well as achieving Islamic economic goals, including fulfilling basic needs, increasing human dignity, sustaining life, and advancing community spirituality.

**Keywords:** Community Empowerment; Poor, Village Cash Labor Intensive; Qualitative; Islamic Economics

## Abstrak

Pemberdayaan masyarakat miskin adalah inisiatif dari individu atau kelompok untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik secara sosial maupun ekonomi. Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa, dengan menganalisis perspektif ekonomi pembangunan Islam di Desa Banua Lawas, Kotabaru. Metode penelitian ini bersifat lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dilaksanakan di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Informan terdiri dari 12 orang, termasuk 2 aparatur desa dan 10 pekerja program padat karya tunai desa. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program padat karya tunai desa berhasil memberdayakan masyarakat miskin sesuai teori Jim Ife dan Frank Tesoriero. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan pendukung teknologi untuk mencapai tujuan program tersebut. Pemberdayaan masyarakat miskin sesuai konsep ekonomi pembangunan Islam oleh M. Umer Chapra, dengan memenuhi prinsip tauhid, rububiyah, khalifah, dan takziah, serta mencapai tujuan ekonomi Islam, termasuk pemenuhan

kebutuhan dasar, peningkatan martabat manusia, keberlanjutan hidup, dan kemajuan spiritualitas masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat; Miskin, Padat Karya Tunai Desa; Kualitatif; Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Tingginya angka kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal<sup>1</sup>. Dalam konteks pembangunan suatu daerah, kemiskinan juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi sosial dan ekonomi, serta keberhasilan upaya pembangunan pemerintah di wilayah tersebut<sup>2</sup>.

Pemerintah dan organisasi internasional telah memprioritaskan upaya untuk mengatasi kemiskinan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif meliputi kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, pemberdayaan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri<sup>3</sup>. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, fasilitas, dan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat muncul sebagai respons terhadap kegagalan dan harapan. Kegagalan tersebut merujuk pada kurangnya hasil dari model-model pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan isu lingkungan yang berkelanjutan. Namun, ada harapan karena terdapat alternatif pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang mencukupi.

Menurut Sumodiningrat, Upaya pemberdayaan masyarakat setidaknya ada dua hal yang bisa di aplikasikan pada masyarakat, yaitu bantuan dana sebagai modal usaha dan pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan. Adanya hal

---

<sup>1</sup> Fajrin Hardinandar, "DETERMINAN KEMISKINAN (STUDI KASUS 29 KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA)," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 1 (1 April 2019): 1–12, <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>.

<sup>2</sup> Deby Oktaviana, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran, terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun," *Syntax Idea* 3, no. 5 (20 Mei 2021): 1034–49.

<sup>3</sup> Dedeh Maryani dan R.R E.Nainggolan, *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

tersebut memiliki tujuan agar masyarakat miskin bisa diberdayakan dan menurunkan angka kemiskinan.

Dalam Islam, pembangunan ekonomi mengacu pada proses menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam kerangka nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat empat tujuan utama dalam ekonomi pembangunan Islam, yakni memastikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dalam jangka panjang, serta mengembangkan dan menjamin aspek spiritualitas<sup>4</sup>. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Hud ayat 61 yang berbunyi :

وَالَّذِي نُنَادِيهِمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya : “dan kepada kaum samud (kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S Hud: 61)

Ayat tersebut dengan tegas menyampaikan bahwa tujuan utama kehadiran manusia di muka bumi adalah untuk menjadikannya sejahtera. Tugas dan tanggung jawab ini dianggap sebagai kewajiban bersama bagi seluruh umat manusia, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Secara aksiologis, manusia itu memiliki dimensi sebagai makhluk yang berkeinginan atau bercita-cita yang terbaik. Terbaik dalam hal ini berarti “yang utama” artinya memberikan derajat yang tinggi bagi manusia, maupun terbaik dalam arti “yang indah” artinya memberikan kepuasan bagi manusia karena tidak ada manusia yang menginginkan keburukan<sup>5</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, diprioritaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain dari anggaran negara, desa juga dapat mengisi pemasukan atau pendapatan desa dari PAD (Pendapatan Asli Desa) seperti hasil usaha, asset, swadaya dan lain lain<sup>6</sup>. Sehingga alokasi dana desa mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa dan digunakan untuk memperkuat potensi lokal serta meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Salah satu bentuk alokasi dari dana desa yaitu program padat karya tunai desa (PKTD). Padat Karya adalah salah satu bentuk pengembangan yang berbasis masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam pembangunan

<sup>4</sup> Bank Indonesia, *EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM*, 1 ed. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 132.

<sup>5</sup> Ansharullah, SAg., M.F. Fil., I, *Filsafat Sebuah Pengantar Umum* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 104.

<sup>6</sup> Adib, *PADAT KARYA TUNAI DESA* (Sleman: Deepublish, 2020), 38.

dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia<sup>7</sup>. PKTD merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disusun dengan menggunakan dana desa. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan peluang kerja dalam jumlah besar dan memberikan honorarium (upah) secara langsung kepada tenaga kerja yang terlibat, baik dalam skala harian maupun mingguan. Walaupun PKTD merupakan program yang hampir mirip dengan BUMDES namun kedua program tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam fokus utama program, yang mana BUMDES lebih berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi di tingkat desa, sedangkan PKTD berorientasi untuk menangani dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan tertentu.

PKTD dapat juga diartikan sebagai pola kerja dalam sebuah kegiatan yang 50 persen anggarannya untuk upah, seperti desa yang mengadakan BUMDES atau kegiatan lainnya yang dimana kegiatan tersebut sebagai PAD dalam desa maka pola PKTD dapat diterapkan didalam kegiatan tersebut dengan memperkejakan masyarakat dengan kriteria yang ada pada PKTD untuk diberdayakan.

Mengutip dari data BPS Provinsi Kalimantan Selatan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebanyak 14.597 jiwa penduduk atau setara dengan 4,22%, pada tahun 2021 sebanyak 16.834 jiwa penduduk atau setara dengan 4,86%, dan pada tahun 2022 sebanyak 15.065 jiwa penduduk atau setara dengan 4,30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah Kotabaru masih tinggi, yang mana total tingkat kemiskinan tersebut berasal dari beberapa desa yang mencakup dari kabupaten tersebut.

Salah satu desa yang menajalankan program padat karya tunai desa (PKTD) ini adalah desa Banua Lawas tepatnya di kabupaten Kotabaru. Bentuk dari PKTD di desa Banua Lawas adalah pengadaan kolam ikan. Pengadaan kolam ikan tersebut merupakan sebuah usaha yang ada pada desa yang menggunakan pola padat karya tunai desa (PKTD) yang sekarang sudah memasuki tahun ke 3 dan menghasilkan 4 kali panen/jual. Kolam ikan tersebut di mulai pada tahun 2020 dengan berhasil memperdayakan sebanyak 10 orang pekerja yang diambil dari masyarakat miskin/kurang mampu. Yaitu 6 orang dipekerjakan diawal pembuatan kolam seperti, 3 orang pembersih lahan dan 3 orang pembuat sarana kolam. 4 orang lainnya dipekerjakan setelah kolam sudah terealisasi sebagai pemelihara kolam. Namun memasuki tahun ke 2 adanya pemunduran 3 orang pekerja dikarenakan keterlambatan upah, sehingga saat ini PKTD di desa Banua Lawas ini menyisakan 7 orang pekerja yang masih bertahan. Akan tetapi didalam tujuan PKTD salah satunya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan namun fakta dilapangan di desa Banua Lawas ini masyarakat yang bekerja di PKTD tergolong pengangguran dan ekonomi lemah tersebut

---

<sup>7</sup> Shingo Nagamatsu dan Faculty of Safety Science, Kansai University, 7-1 Hakubaicho, Takatsukishi, Osaka 569-1098, Japan, "Are Cash for Work (CFW) Programs Effective to Promote Disaster Recovery? Evidence from the Case of Fukushima Prefecture," *Journal of Disaster Research* 9, no. 2 (1 Maret 2014): 165, <https://doi.org/10.20965/jdr.2014.p0161>.

memilih berhenti di program PKTD ini. Maka daripada itu berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Padat Karya Tunai Desa dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam (Studi Kasus Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru)”.

## LANDASAN TEORI

### A. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kekuatan atau penguatan kepada masyarakat dengan maksud untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kesejahteraan mereka. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada melalui kegiatan dan program yang dilengkapi dengan pendampingan. Pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan motivasi, arahan, dan menggali potensi yang dimiliki oleh mereka sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka<sup>8</sup>. Memberdayakan masyarakat menurut Chamber adalah ide dalam pengembangan ekonomi yang mencakup nilai-nilai masyarakat untuk menciptakan paradigma baru dalam proses pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, partisipatif, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa konsep pembangunan dengan penerapan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi lebih sebagai usaha untuk menemukan alternatif pertumbuhan ekonomi lokal<sup>9</sup>.

Menurut Jim Iffe dan Frank Tesoriero, terdapat empat peran pemerintah dalam pemberdayaan. Pertama, sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam menyediakan akses dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan potensi dan kemampuan masyarakat. Kedua, sebagai edukator, pemerintah memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk memperkuat pemberdayaan mereka. Ketiga, sebagai representatif, pemerintah mewakili suara dan kepentingan masyarakat yang kurang mampu. Terakhir, sebagai pendukung teknologi, pemerintah memfasilitasi akses masyarakat terhadap teknologi yang dapat meningkatkan pemberdayaan mereka. Melalui peran-peran ini, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan sosial<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 29.

<sup>9</sup> Munawar Noor, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,” no. 2 (2011): 88.

<sup>10</sup> Ika Devi Lestari dan Sri Wibawani, “PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KERAJINAN AKAR JATI DI KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH,” *Publik: Jurnal Manajemen Sumber*

## B. Ekonomi Pembangunan Islam

Ekonomi pembangunan Islam mengusung filosofi, konsep, dan teori yang berbeda dibandingkan dengan teori dan model pembangunan Barat. Pembangunan ekonomi Islam mendorong individu untuk mencapai keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan akhirat, menekankan keadilan dalam hak-hak individu dan kebutuhan masyarakat, mempromosikan harmoni antara individu dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan dan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, Islam secara tegas mengatur cara umatnya harus menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan pedoman utama mereka, yaitu Al-Qur'an dan hadis<sup>11</sup>. Pembangunan dilakukan oleh negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik di duniawi maupun ukhrawi. Pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga harus terkait dengan aspek yang lebih abadi, yaitu akhirat<sup>12</sup>.

Ada 4 tujuan utama ekonomi pembangunan Islam yaitu sebagai berikut<sup>13</sup> :

### a. Menjamin kebutuhan dasar manusia

Salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi Islam adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Prinsip ini sejalan dengan salah satu nilai pokok pembangunan yang disebut sebagai "*sustenance*". Seperti yang umum diketahui, setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar dapat menjalani kehidupan. Kebutuhan ini juga dikenal sebagai kebutuhan primer atau dasar, yang mencakup akses terhadap makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam konteks ini, pembangunan dalam Islam harus berfokus pada memastikan ketersediaan kebutuhan ini untuk seluruh lapisan masyarakat.

### b. Meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tujuan ekonomi pembangunan Islam adalah meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Perhatian pun beralih pada pemenuhan kebutuhan pendukung dan peningkatan kualitas hidup. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus dikejar tanpa batas. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan dasar tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Ada titik ideal yang harus dicapai, sehingga prinsip ini juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan

---

Daya Manusia, *Administrasi dan Pelayanan Publik* 9, no. 2 (26 Mei 2022): 333-44, <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.346>.

<sup>11</sup> Soritua Ahmad Ramdani Harahap, "PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MELALUI PERAN SUMBER DAYA MANUSIA" 6, no. 1 (2021): 4.

<sup>12</sup> Agung Eko Purwana, "PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Justicia Islamica* 10, no. 1 (1 Juni 2013): 14, <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.140>.

<sup>13</sup> Bank Indonesia, *EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM*, 132-35.

bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan yang meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia.

c. Menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang

Dalam ajaran Islam, juga diajarkan bahwa tujuan pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam prinsip ekonomi pembangunan Islam, fokusnya bukan hanya pada peningkatan nilai ekonomi (output) dalam periode tertentu saja. Pembangunan juga harus memastikan kelangsungan output di masa depan. Tujuan ekonomi pembangunan Islam dalam konteks ini sejalan dengan paradigma pembangunan kontemporer, yaitu pembangunan yang berkelanjutan.

d. Menumbuhkan dan menjamin spiritualitas

Dalam konteks ini, tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kebebasan dan meningkatkan kebahagiaan individu. Pusat perhatian utama pembangunan dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan spiritualnya.

Pembangunan harus mengacu dan didasarkan pada ketentuan syariat Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam perspektif ekonomi Islam, fokus utama adalah pada pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif. Selain itu, pembangunan tidak hanya terarah pada kemajuan ekonomi masyarakat, melainkan juga pada perkembangan keberadaan mental individu.

Ekonomi pembangunan Islam harus seiring dan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara keseluruhan. Perbedaan pokok antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada dasar paradigma yang mendasarinya. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan pada paradigma Islam, sementara ekonomi konvensional dikembangkan dengan pendekatan yang bersifat sekuler seperti menekankan prinsip ekonomi pasar yang tujuannya memaksimalkan keuntungan.

Dalam ilmu ekonomi Islam, terdapat empat prinsip dasar yang sering diacu, yaitu: Keesaan (Tauhid), Keseimbangan (Al-'Adl wa Al-Ihsan), Kebebasan Berkehendak (Ikhtiar), dan Tanggung Jawab (Fard). Keempat prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang diterangkan oleh Bank Indonesia melalui dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Nilai-nilai tersebut mencakup kepemilikan, pertumbuhan yang seimbang, berusaha dengan keadilan, dan kerjasama dalam kebaikan<sup>14</sup>.

M. Umer Chapra mengemukakan empat konsep pendekatan pembangunan dalam Islam, yaitu:

a. Konsep Tauhid

---

<sup>14</sup> Bank Indonesia, 11.

Tauhid mencerminkan tanda dan bukti dari kesetiaan manusia kepada Allah, dan berfungsi sebagai landasan prinsip bagi manusia dalam membina hubungan dengan sesama manusia. Tauhid sendiri merupakan konsep dasar dalam ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah dan mengajarkan bahwa segala tindakan dan kepercayaan manusia harus selaras dengan kehendak-Nya.

b. Konsep Rububiyah

Konsep kedua ini bertindak sebagai hukum alam semesta yang mengatur metode dan prosedur penggunaan sumber daya alam untuk kemajuan umat.

c. Konsep Khalifah

Konsep ini berasal dari peran atau eksistensi manusia di dunia sebagai khalifah, yang memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Sang Pencipta. Konsep ini juga mencerminkan bagaimana Allah memberikan amanah kepada manusia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk moralitas, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip kehidupan.

d. Konsep Takziyah

Konsep ini dapat diperhatikan melalui tugas mulia yang dilaksanakan oleh setiap Nabi Allah dalam membersihkan dan membangun umatnya, yang tercermin dalam setiap langkah dan interaksi mereka dengan sesama manusia, lingkungan, negara, dan masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi fakta, memahami masalah, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang berarti adanya metode wawancara dan Dokumentasi yang informasinya diperoleh langsung melalui 10 orang pekerja PKTD dan 2 orang Aparatur Desa yaitu Kepala Desa dan Kaur Kesejahteraan Masyarakat. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang bekerja di PKTD di Desa Banua Lawas, dan Objek penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat.

## HASIL PENELITIAN

### A. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada informan mendapatkan hasil bahwa sebagian besar dari para pekerja PKTD sangat merasa terbantu dengan adanya program tersebut walaupun, terkadang harus terkendala



dengan keterlamabatan pemberian upah namun, sebagian besar dari mereka memaklumi hal tersebut dan tetap melanjutkan pekerjaan yang diberikan.

Dalam hal ini program PKTD seiring dengan teori yang ditetapkan oleh *Jim Ife* dan *Frank Tesoriero* yang dikutip dari Jurnal (Lestari dan Wibawani, 2022, bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan terbagi menjadi empat yaitu, *fasilitator* dimana pihak pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dengan dibuatnya kolam ikan yang merupakan bagian dari program PKTD dan kemudian dikelola oleh pekerja yang ditunjuk dari masyarakat. kedua, *edukator* dengan ini pemerintah desa juga melakukan dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan sebelum para pekerja terjun kelapangan. Ketiga, *representatif*, dalam hal ini pemerintah desa selalu terbuka mendengarkan suara masyarakat salah satunya dalam memperdayakan masyarakat kurang mampu. Terakhir, *technology support*, dalam proses penggarapan kolam ikan yang dilakukan pekerja, pemerintah desa tentunya memberikan fasilitas yang mendukung kegiatan pekerja dengan adanya pengadaan alat ekskavator untuk pembukaan lahan dan selain itu para pekerja juga bebas menggunakan motor dinas desa selama dalam masa bekerja.

Pemberdayaan masyarakat miskin berupa Program (PKTD) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banua Lawas secara garis besar memberikan dampak positif untuk jangka pendek dan jangka panjang bagi beberapa pekerja. Hal ini dapat terlihat dengan terbantunya kebutuhan ekonomi keluarga dan beberapa lainnya dapat mempergunakan uang hasil bekerja sebagai tambahan membuka usaha yang kemudian dengan usaha tersebut akan membantu perekonomian keluarga lebih lanjut (jangka panjang).

Sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh *Chamber* bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi, lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

## **B. Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Di Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru.**

Pembangunan ekonomi dalam Islam memiliki perbedaan konsep dengan pembangunan ekonomi secara konvensional. Jika dalam konvensional pembangunan ekonomi adalah tujuan akhir maka, hal ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan dalam Islam yang mana Setiap manusia diperintahkan Allah untuk tidak mengerjakan apapun dalam dunia kecuali

untuk mencari rahamat (ridho) Allah, namun tidak menghalangi manusia lainnya untuk melakukan kemajuan dan kesejahteraan. Karena pada dasarnya ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang sesuai dengan syari'at yaitu mencapai kemaslahatan umat.

a. Konsep Tauhid

Konsep tauhid merupakan Keyakinan akan keesaan Allah dapat memengaruhi sikap dan perilaku moral seseorang, misalnya, kepatuhan pada ajaran agama. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pihak pemerintah desa Banua Lawas yang memberdayakan masyarakat melalui program PKTD dimana program ini di adakan untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah agar masyarakat tersebut mampu merubah perekonomian keluarga tersebut menjadi lebih baik lagi. Dari sudut pandang para pekerja juga menerapkan konsep tauhid ini karena para pekerja telah dijadwalkan bekerja diluar dari waktu sholat yang tentunya program PKTD ini tidak mengganggu hubungan antara manusia dengan Rabb-nya.

b. Konsep Rububiyah

Konsep Rububiyah memandang sumber daya alam sebagai amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam konteks pembangunan umat, pemahaman ini dapat membentuk pandangan manusia terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, adil, dan beretika. Hal tersebut telah diterapkan oleh pihak pemerintah desa Banua Lawas dengan program PKTD nya dimana penerepannya seperti pemanfaatan tanah yang tidak terpakai menjadi pengadaan kolam ikan sebagai lapangan pekerjaan untuk masyarakat miskin dengan tujuan memberdayakan masyarakat miskin yang ada di desa tersebut tentunya hal ini meunjukkan bahwa desa tidak hanya memprioritaskan masyarakat kalangan atas namun pemerintah desa juga peduli dan empati pada masyarakat kalangan bawah. Bentuk lainnya yang diterapkan seperti pengadaan upah dan pembinaan kepada pekerja sehingga hal tersebut menjadi pendorong kepada pekerja agar dapat merubah perekonomiannya menjadi lebih baik lagi.

c. Konsep Khalifah

Konsep Khalifah menekankan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah (pemimpin, wakil) Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada Allah terlebih pada bidang ekonomi. Adapun konsep khalifah ini telah berjalan pada program PKTD di desa Banua Lawas, penerapan yang dilakukan seperti adanya pemerintah desa yang bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat dengan

tujuan memperbaiki perekonomian masyarakat miskin tersebut. Bentuk penerapan yang lainnya yang diterapkan adalah kepeduliannya pihak desa kepada masyarakat yang sudah dilibatkan menjadi pekerja PKTD namun terhalang akses transportasi untuk datang ke tempat kerja maka pihak desa menyediakan kendaraan operasional kepada pekerja yang membutuhkan untuk kepentingan dalam pekerjaan.

d. Konsep Takziah

Konsep takziah merupakan pembersihan dan pembangunan umat agar mencerminkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk hubungan yang baik dengan sesama manusia, alam sekitar, Negara, dan masyarakat. Sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah desa Banua Lawas yang melaksanakan program PKTD dengan bentuk lapangan pekerjaan pengelolaan kolam ikan dimana tujuannya agar masyarakat miskin dapat diberdayakan sehingga angka kemiskinan suatu negara berkurang hal ini merupakan suatu kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara karena ketika suatu masyarakat didesa tersebut telah mengalami perbaikan didalam ekonominya maka angka kemiskinan pada suatu negara tersebut akan menurun yang pastinya akan menambah laju pertumbuhan ekonomi.

Di dalam buku *Ekonomi Pembangunan Islam* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa tujuan utama ekonomi pembangunan islam ada 4 :

a. Menjamin kebutuhan dasar manusia

Kebutuhan dasar dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok yang harus dijamin oleh pihak penjamin. Sebagaimana yang peneliti lakukan pada program PKTD di desa Banua Lawas didapatkan hasil bahwa dari seluruh hasil wawancara yang dilakukan masyarakat yang diberdayakan pada program tersebut merasa terjamin dikarenakan adanya upah yang mampu membantu dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

b. Meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia

Peningkatan kapabilitas dan martabat manusia adalah hal yang harus dilaksanakan setelah adanya penjaminan kebutuhan dasar. Didalam program PKTD di desa Banua Lawas merupakan pengadaan lapangan pekerjaan dimana kemampuan masyarakat dimiliki masyarakat akan bertambah dengan adanya pembinaan dalam pekerjaan yang tentunya menjadi modal pengetahuan dan pengajaran yang bermanfaat. Didalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKTD ini membuat masyarakat ekonomi kalangan lemah tidak lagi dipandang sebelah mata karena adanya pekerjaan tersebut membuat masyarakat yang awalnya pengangguran yang dinilai sebagai masyarakat rendah menjadi masyarakat yang memiliki martabat.

c. Menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, seseorang dapat dianggap terberdaya ketika merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Hal ini yang dirasakan oleh pekerja PKTD di desa Banua Lawas beberapa diantara pekerja dapat membuka usaha dari adanya program pemberdayaan masyarakat tersebut yang tentunya usaha tersebut masih berjalan hingga sekarang sehingga memberikan manfaat dari segi perekonomian masyarakat tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang.

d. Menumbuhkan dan menjamin spritualitas

Dalam islam mencari nafkah keluarga adalah hal yang wajib dilaksanakan, namun tidak memutuskan hubungan antara hamba dengan tuhan nya maka pada program pemberdayaan masyarakat berupa PKTD di desa Banua Lawas ini menetapkan waktu kerja diluar dari waktu ibadah pekerja, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa program PKTD yang dijalankan di desa Banua Lawas tidak mengganggu kegiatan spritualitas pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) yang dilakukan di desa Banua Lawas sudah berjalan dengan baik karena pihak desa telah menerapkan empat peran yang dimaksud oleh Jim Iff dan Frank Tesoriero, sehingga beberapa masyarakat merasa teberdayakan dengan hal tersebut sesuai dengan pernyataan Chamber yaitu pemberdayaan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan dasar atau menurunkan angka kemiskinan saja.

## KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru mengenai tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Padat Karya Tunai Desa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa di desa Banua Lawas kabupaten Kotabaru telah berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Jim Iff dan Frank Tesoriero dimana pemerintah desa telah menerapkan empat peran dalam memberdayakan masyarakat yaitu sebagai fasilitator, educator, refresentatif dan pendukung tekhnologi sehingga program PKTD mencapai tujuannya yaitu untuk memberdayakan masyarakat miskin dan memperbaiki ekonomi yang lemah.
2. Perspektif ekonomi pembangunan islam pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) telah sesuai dengan ketetapan konsep yang di paparkan oleh M. Umer Chapra dimana dalam pembangunan ekonomi haruslah menerapkan empat konsep yaitu, tauhid, rububiyah, khalifah, dan takziyah.

Adapun tujuan ekonomi pembangunan islam yang ada empat yaitu menjamin kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, serta menumbuhkan dan menjamin spritualitas. Maka tujuan tersebut telah tercapai pada program padat karya tunai desa (PKTD) di desa Banua Lawas yang dapat dilihat dari manfaat yang didapat oleh masyarakat yang diberdayakan.

## Daftar Pustaka

- Adib. *PADAT KARYA TUNAI DESA*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Ansharullah, SAg., M.F. Fil., I. *Filsafat Sebuah Pengantar Umum*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Bank Indonesia. *EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM*. 1 ed. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani. "PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MELALUI PERAN SUMBER DAYA MANUSIA" 6, no. 1 (2021).
- Hardinandar, Fajrin. "DETERMINAN KEMISKINAN (STUDI KASUS 29 KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA)." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 1 (1 April 2019): 1–12. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>.
- Lestari, Ika Devi, dan Sri Wibawani. "PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KERAJINAN AKAR JATI DI KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 9, no. 2 (26 Mei 2022): 333–44. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.346>.
- Maryani, Dedeh, dan R.R E.Nainggolan. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nagamatsu, Shingo dan Faculty of Safety Science, Kansai University, 7-1 Hakubaicho, Takatsukishi, Osaka 569-1098, Japan. "Are Cash for Work (CFW) Programs Effective to Promote Disaster Recovery? Evidence from the Case of Fukushima Prefecture." *Journal of Disaster Research* 9, no. 2 (1 Maret 2014): 161–75. <https://doi.org/10.20965/jdr.2014.p0161>.
- Nofriansyah, Deny. *Analisis Kinerja Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Noor, Munawar. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT," no. 2 (2011).
- Oktaviana, Deby, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran, terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun." *Syntax Idea* 3, no. 5 (20 Mei 2021): 1034–49.
- Purwana, Agung Eko. "PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Justicia Islamica* 10, no. 1 (1 Juni 2013). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.140>.